

## Prinsip Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Zakat: Perspektif PSAK 109

Anisah Zhafirah<sup>1</sup>; Indah Safira<sup>2</sup>; Ikram Aditya<sup>3</sup>; Klariza Shakila<sup>4</sup>

### Abstrak

*Perspektif PSAK 109 adalah standar akuntansi khusus untuk entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, melalui pengaturan Manajemen Syariah dan Zakat (Olivia et al., 2023). Kepatuhan syariah memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan hukum Islam sambil menekankan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan. Tujuan penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengadaan zakat adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi zakat. PSAK 109 memberikan pedoman tentang jumlah dan waktu pembayaran zakat serta informasi tentang penggunaan hasil zakat lintas batas. Diharapkan lembaga amil zakat dapat menggunakan metode akuntansi syariah untuk menilai laporan keuangan mereka, yang tidak hanya akurat tetapi juga memenuhi persyaratan syariah. Ini mengurangi praktik riba, gharar, dan maisir serta meningkatkan kesadaran akan integritas setiap transaksi.*

**Kata Kunci:** Zakat, PSAK 109, Prinsip Akuntansi Syariah.

### Abstract

*The perspective of PSAK 109 is a specific accounting standard for entities operating based on Sharia principles, through the regulation of Sharia Management and Zakat. Sharia compliance ensures that all economic activities are conducted in accordance with Islamic law while emphasizing honesty, transparency, and accountability in every financial transaction. The purpose of implementing Sharia accounting principles in zakat procurement is to enhance public trust in zakat organizations. PSAK 109 provides guidelines on the amount and timing of zakat payments as well as information on the cross-border use of zakat proceeds. It is expected that zakat management institutions can use Sharia accounting methods to assess their financial reports, which are not only accurate but also comply with Sharia requirements. This reduces the practice of riba, gharar, and maisir, and increases awareness of the integrity of each transaction.*

**Keywords:** Zakat, PSAK 109, Syariah Accounting Principles.

---

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, [anisahzhafirah3@gmail.com](mailto:anisahzhafirah3@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, [sfraindh@gmail.com](mailto:sfraindh@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, [ikramaditya00@gmail.com](mailto:ikramaditya00@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, [Klarizaashakila@gmail.com](mailto:Klarizaashakila@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Prinsip akuntansi syariah merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa praktik akuntansi sejalan dengan nilai-nilai dan hukum Islam (Judijanto, 2023). Dalam konteks ini, akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pelaporan dan pengukuran keuangan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, akuntansi syariah berupaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan umat (Saing & Batubara, n.d.).

Dalam perspektif PSAK 109, pengelolaan zakat secara akuntabel dan transparan menjadi landasan penting bagi lembaga pengelola zakat untuk menjalankan tugasnya dengan amanah. PSAK 109 tidak hanya mengatur teknis pelaporan keuangan, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendistribusian dana zakat. Dengan pengungkapan yang jelas mengenai sumber dan penggunaan dana, lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang lebih kuat dalam membantu para mustahik melalui zakat yang tepat sasaran (Irpan et al., 2021). Dalam jangka panjang, implementasi PSAK 109 diharapkan dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

PSAK 109 menjelaskan bahwa zakat harus dicatat dan dilaporkan secara terpisah dari laporan keuangan entitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada para muzakki dan mustahik tentang penggunaan dana zakat. Dengan adanya standar ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih profesional, menghindari penyalahgunaan, dan memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk tujuan yang sesuai (Musana, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam pengelolaan zakat dari sudut pandang PSAK 109 (Lakisa et al., 2023). Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan penelitian kualitatif digunakan dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis mendalam dari fenomena yang diteliti dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan kesulitan yang dihadapi lembaga amil zakat saat menerapkan PSAK 109 (Makmur et al., 2023).

## B. KAJIAN TEORI

Prinsip-prinsip akuntansi syariah berfungsi sebagai dasar untuk penerapan praktik akuntansi syariah, yang menekankan pada prinsip-prinsip sosial dan etika (Djamil, 2023). Kajian ini menggunakan pemahaman bahwa akuntansi tidak hanya melaporkan kondisi keuangan tetapi juga mencapai tujuan sosial dan moral, seperti pengelolaan zakat. Hipotesis studi ini adalah bahwa menerapkan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efek sosial yang baik.

Sebagai langkah awal, sangat penting untuk memahami PSAK 109 untuk menilai bagaimana zakat dikelola oleh lembaga filantropi. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan zakat, memungkinkan lembaga untuk melakukan pencatatan yang sistematis. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada para muzakki untuk mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program zakat.

Dalam akuntansi syariah, akuntabilitas sangat penting. Dengan berlakunya PSAK 109, lembaga pengelola zakat diwajibkan untuk memberikan laporan yang jelas dan akurat tentang cara dana zakat digunakan. Menurut perspektif ini, lembaga zakat yang menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki dampak sosial yang signifikan dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain itu, dampak sosial dari pengelolaan zakat yang efektif harus diukur dan dinilai secara teratur. Lembaga dapat menggunakan PSAK 109 untuk menyusun laporan yang tidak hanya mencakup aspek keuangan tetapi juga indikator kinerja sosial yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif program zakat mereka. Hipotesis ini menunjukkan bahwa organisasi yang melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya secara teratur akan memiliki dampak sosial yang lebih baik pada komunitas.

Dalam situasi seperti ini, sosialisasi dan pendidikan tentang pengelolaan zakat sangat penting. Menurut kerangka berpikir ini, memahami zakat sebagai alat ekonomi penting dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat akan berkorelasi positif dengan peningkatan kontribusi zakat yang diberikan oleh lembaga pengelola.

Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan zakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program zakat. Penelitian yang mendalam diharapkan akan menemukan saran konkret tentang cara memperbaiki pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

### C. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari prinsip akuntansi syariah dan pengelolaan zakat dalam konteks PSAK 109. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kompleks tentang fenomena sosial, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan standar yang mengatur pengelolaan zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam lembaga-lembaga yang menerima zakat.

Pengelola zakat, muzakki, dan ahli akuntansi syariah akan diwawancarai untuk mendapatkan data. Salah satu tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan pandangan yang beragam tentang praktik pengelolaan zakat serta pelaksanaan PSAK 109. Selain itu, studi dokumentasi akan dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan dan dokumen kebijakan dari lembaga-lembaga pengelola zakat. Diharapkan bahwa penggunaan kedua sumber data ini akan memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam pengelolaan zakat.

Analisis data akan dilakukan secara tematik untuk menemukan pola dan tema dari data yang dikumpulkan. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan tentang bagaimana penerapan PSAK 109 berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan

zakat. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang mendalam yang menggambarkan pengalaman dan pendapat para informan, serta bagaimana temuan tersebut berdampak pada praktik pengelolaan zakat dalam konteks ekonomi syariah.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi ini menemukan bahwa penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat (Amin & Hamid, 2022). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola lembaga zakat yang menerapkan PSAK 109 dapat membuat laporan keuangan yang lebih sistematis dan terorganisir, dan ini membantu stakeholder memahami bagaimana dana zakat digunakan. Dalam situasi seperti ini, penerapan aturan akuntansi syariah membantu institusi menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat, mengangkat elemen akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Selain itu, pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan PSAK 109 dapat memberikan laporan yang mencakup semua aspek penting, seperti pengakuan dan pengukuran dana zakat, serta laporan penggunaan zakat yang lebih rinci. Ini sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Laporan yang jelas dan akurat tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, yang berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat.

Dalam struktur ekonomi Islam, pengelolaan zakat merupakan komponen penting yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki tujuan penting bagi masyarakat, bukan hanya sebagai sarana ibadah tetapi juga sebagai alat untuk menyebarkan kekayaan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan benar dan jelas agar dapat memberikan dampak terbaik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi harus menjadi dasar pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat (LAZ) dan badan pengelola zakat (BAZ) harus menyusun laporan keuangan yang transparan dan terbuka untuk umum (Indrarini, 2017). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat. Jika ada laporan yang terbuka, para donatur dapat memastikan bahwa dana zakat mereka digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu.

Dalam pengelolaan zakat, pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah dapat membantu dengan membuat peraturan yang membuat pengumpulan dan distribusi zakat lebih mudah. Selain itu, masyarakat harus dididik secara berkelanjutan tentang pentingnya zakat untuk meningkatkan kesadaran mereka. Dengan melibatkan berbagai pihak, pengelolaan zakat akan lebih terintegrasi dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Membuat perubahan dalam program pemberdayaan mustahik juga penting untuk manajemen zakat yang efektif. Program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara finansial. Zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak hanya sebagai bantuan sementara.

Menggabungkan akuntansi syariah dengan pengelolaan zakat adalah langkah strategis untuk meningkatkan peran zakat sebagai alat sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan berbasis pada prinsip-prinsip syariah, akuntansi syariah memberikan kerangka kerja yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat dapat lebih mudah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang berfokus pada kesejahteraan penerima zakat dengan menggunakan pendekatan akuntansi syariah.

Akuntansi syariah memungkinkan pengukuran dan pelaporan keuangan zakat. Dalam situasi ini, lembaga amil zakat (LAZ) harus menggunakan metode akuntansi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat. Masyarakat dapat lebih percaya bahwa dana zakat mereka digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mustahik jika ada laporan keuangan yang jelas dan akuntabel.

Implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan zakat juga membutuhkan sistem informasi yang baik. Lembaga pengelola zakat dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data terkait zakat dengan lebih baik. Dengan sistem informasi yang baik, mereka dapat memantau distribusi dan penggunaan dana zakat secara real-time. Selain meningkatkan efisiensi, hal ini memungkinkan organisasi untuk melakukan evaluasi program dengan cara yang lebih sistematis.

Landasan penting untuk pengelolaan zakat adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam akuntansi syariah. Prinsip-prinsip ini menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dan mereka harus diterapkan dalam setiap aspek manajemen zakat. Dengan menerapkan etika yang kuat, lembaga pengelola zakat dapat memastikan bahwa setiap aspek proses, mulai dari pengumpulan hingga pembagian, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi ini memungkinkan program yang lebih direncanakan untuk mendukung mustahik. Lembaga zakat dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan seperti dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan dengan akuntansi syariah yang baik. Metode ini sesuai dengan tujuan zakat karena tidak hanya menawarkan bantuan keuangan, tetapi juga membantu orang-orang yang membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan potensi ekonomi mereka.

Untuk menyimpulkan, penggabungan pengelolaan zakat dan akuntansi syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi dana zakat. Lembaga pengelola zakat dapat memperkuat perannya sebagai agen perubahan sosial dengan menerapkan akuntansi syariah yang transparan dan akuntabel. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum melalui pendekatan yang berbasis etika dan teknologi informasi.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan beberapa masalah dalam menerapkan PSAK 109 di lembaga amil zakat. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pengelola adalah pemahaman yang tidak memadai tentang prinsip akuntansi syariah. Banyak pengelola belum memahami aspek teknis PSAK 109, yang dapat menghambat implementasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk memberikan pelatihan dan seminar kepada staf akuntansi

mereka untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan standar ini.

Selain itu, temuan observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang memadai diperlukan untuk pengelolaan zakat yang efektif. Organisasi yang menerapkan sistem informasi yang mengikuti prinsip akuntansi syariah cenderung lebih efisien dalam manajemen dan laporan dana zakat. Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi zakat meningkatkan produktivitas dan memungkinkan laporan yang lebih jelas dan akuntabel.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga amil zakat mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam penerapan PSAK 109 dengan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi. Dengan melakukan ini, lembaga zakat tidak hanya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas mereka, tetapi juga dapat membantu membangun masyarakat secara lebih luas dengan mengelola zakat secara profesional dan berdasarkan prinsip akuntansi syariah.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di lembaga amil zakat. Lembaga-lembaga ini dapat menyusun laporan keuangan yang lebih jelas dan terorganisir dengan menggunakan prinsip akuntansi syariah. Ini akan memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana zakat digunakan dan dialokasikan. Standar ini meningkatkan legitimasi lembaga di masyarakat dan memenuhi kebutuhan pelaporan.

Namun, beberapa lembaga masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan PSAK 109. Efektivitas penerapan standar zakat dihambat oleh pemahaman yang buruk tentang prinsip akuntansi syariah dan kurangnya pelatihan bagi pengelola zakat. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk pengelolaan zakat yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan agar lembaga amil zakat terus mengembangkan sistem informasi akuntansi yang akan membantu mereka melaksanakan PSAK 109. Memanfaatkan peningkatan pemahaman, pelatihan, dan teknologi informasi akan memungkinkan lembaga zakat untuk tidak hanya memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan akuntansi syariah yang konsisten dan profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

## F. SARAN

Pertama, disarankan agar lembaga pengelola zakat secara aktif menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 109. Untuk mencapai hal ini, sistem pelaporan yang sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat diperlukan. Lembaga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dan masyarakat secara umum terhadap pengelolaan zakat dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan informasi tentang penggunaan dana zakat. Ini akan mendorong partisipasi yang lebih besar.

Kedua, pengelola dan karyawan lembaga zakat harus dilatih dalam akuntansi syariah dan pengelolaan zakat. Pelatihan ini harus mencakup pentingnya prinsip etika dalam pengelolaan zakat serta elemen-elemen teknis dan praktis dari penerapan PSAK 109. Dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia lembaga zakat, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih profesional dan efektif, dengan dampak sosial yang lebih besar.

Terakhir, disarankan untuk meningkatkan kerja sama antara lembaga pengelola zakat dan praktisi akuntansi syariah atau akademisi. Dengan bantuan kerja sama ini, penelitian dan pengembangan tentang praktik pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Hasilnya akan menjadi rekomendasi yang berdasarkan bukti dan dapat diandalkan. Akibatnya, zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

### G. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., & Hamid, M. A. (2022). Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(2), 85–98.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166–178.
- Irpan, M., Kurnianti, I., Gunawan, S. S., & Zainul, H. M. (2021). Branding Media Komunikasi dalam Manajemen Pemasaran terhadap Potensi Zakat Produktif. *Literacy*, 3(1), 24–45.
- Judijanto, L. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Bisnis. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik*, 1(2), 30–34.
- Lakisa, F., Suleman, S. S., & Pilomonu, M. S. (2023). Implementasi PSAK 109 terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baznas Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 148–157.
- Makmur, I., Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251.
- Musana, K. (2023). Optimalisasi pengelolaan zakat dengan teknologi blockchain. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–94.
- Olivia, H., Siregar, N. S. H., Nadirah, W. R., Inayatussyfa, A., & Saragih, S. R. (2023). Perkembangan Penelitian Bibliometrik PSAK 109 Menggunakan Vosviewer. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 265–279.
- Saing, C. N., & Batubara, C. (n.d.). *PERAN MANAJEMEN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.